

**Implementasi Laba Badan Usaha Milik Desa Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Menurut Perspektif Keuangan Islam
(Studi Pada BUMDES Desa Mattanete Bua Kec. Palakka
Kab.Bone)**

¹Ina Sakina, ²Muh. Arafah, ³Rina Novianty

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

E-mail: ¹inasakina63@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi laba Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menelaahnya dari perspektif keuangan Islam. Studi ini dilakukan pada BUMDes Desa Mattanete Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung kepada pengurus BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan (1) Bahwa BUMDes Mattanete Bua memiliki tiga unit usaha utama yaitu penyediaan air bersih, penjualan pupuk dan pestisida, serta layanan BRI-Link. Meskipun laba yang diperoleh belum signifikan, distribusinya telah mencerminkan prinsip keadilan dan musyawarah dengan dialokasikan untuk modal usaha, pendapatan asli desa (PAD), dan insentif pengurus. Namun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan modal, fluktuasi pendapatan akibat kerusakan fasilitas, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. (2) Pada perspektif keuangan Islam, laba bukan hanya dianggap sebagai keuntungan material, melainkan amanah yang harus dikelola secara adil, halal, dan memberikan manfaat sosial. Implementasi nilai-nilai keuangan Islam seperti keadilan, musyawarah, transparansi, dan tanggung jawab sosial tercermin dalam pengelolaan BUMDes, meskipun masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi laba BUMDes telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam hal akses air bersih dan kemudahan transaksi keuangan. Namun kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan yang lebih efisien dan sesuai dengan prinsip keuangan Islam untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kata kunci : BUMDes, laba, Kesejahteraan masyarakat, keuangan Islam.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of profits generated by the Village-Owned Enterprise (BUMDes) in improving community welfare and to analyze it from the perspective of Islamic finance. The study was conducted at BUMDes Mattanete Bua, Palakka District, Bone Regency. The method used was a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, documentation, and direct observation of BUMDes management. The results of the study indicate that: (1) BUMDes Mattanete Bua operates three main business units: clean water

provision, fertilizer and pesticide sales, and BRI-Link services. Although the profits obtained are not yet significant, their distribution reflects the principles of fairness and deliberation, being allocated to business capital, village original revenue (PAD), and management incentives. However, challenges faced include limited capital, fluctuating income due to facility damage, and limited human resource capacity in financial management and reporting. (2) From the perspective of Islamic finance, profit is not merely considered material gain but a trust that must be managed fairly, lawfully (halal), and in a way that provides social benefit. The implementation of Islamic financial values such as justice, deliberation, transparency, and social responsibility is reflected in the management of BUMDes, although there is still room for improvement. This study concludes that the implementation of BUMDes profits has provided direct benefits to the community, particularly in terms of access to clean water and ease of financial transactions. Nevertheless, its overall contribution to improving community welfare remains limited. Therefore, it is necessary to enhance professionalism, community participation, and more efficient management in accordance with Islamic financial principles to achieve sustainable welfare goals.

Keywords : *Village-Owned Enterprise (BUMDes), Profit, Community Welfare, Islamic Finance*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian merupakan proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan pendapatan ekonomi secara berkesinambungan untuk menuju era yang lebih maju. Oleh karena itu diperlukan perhatian dari pihak pemerintah khususnya desa dengan kebijakan-kebijakan yang relevan dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat yang makmur dan madani. Pembangunan desa dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa agar menjadi wadah warga desa untuk membangun diri dan lingkungan sekitar, memaksimalkan aset dan sumber daya yang dimiliki desa secara independen sehingga angka kemiskinan pun dapat berkurang. BUMDes dipercaya mampu menjadi stimulus dalam meningkatkan perekonomian di kalangan masyarakat, dimana aset yang dimiliki desa harus dilaksanakan seutuhnya oleh warga masyarakat (Purba et al., 2025).

Fenomena yang sering terjadi keberadaan BUMDes membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial. Pergeseran nilai

sosial dan juga perubahan pola interaksi antar warga akan terjadi. BUMDes memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa, namun pendapatan ini tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan warga berpendapat bahwa keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga. BUMDes dan Pemerintah Desa memiliki relasi yang erat, karena Pemerintah Desa menjadi pengawas dari kegiatan yang dilakukan BUMDes. Dalam pengambilan keputusan, BUMDes menggunakan mekanisme musyawarah dan Pemerintah Desa adalah pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam musyawarah tersebut. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi memunculkan ketidakpercayaan warga kepada kemampuan pengelola dalam pengelolaan BUMDes. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi ini memunculkan tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Profesionalisme menjadi tuntutan bagi pengelola BUMDes. Tuntutan itu juga muncul dari masyarakat. Pengelola BUMDes perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan juga kemampuan mengelola organisasi. Permasalahan muncul dimana hampir sebagian besar pengelola BUMDes adalah

karyawan paruh waktu yang memiliki pekerjaan lain selain di BUMDes (Anggraeni, 2019).

Desa Mattanette Bua memiliki tiga unit usaha BUMDes yaitu air bersih, penjualan pupuk/pestisida dan layanan BRI-Link. PAD dari BUMDes awalnya 1-2 juta pertahun, meningkat menjadi 5-6 juta pertahun, namun masih kecil dibanding BUMDes yang lain. Pendistribusian laba sebagian untuk modal usaha, untuk PAD, dan intensif pengurus. BUMDes memberikan dampak positif yang dirasakan masyarakat dengan adanya akses air bersih, kemudahan transaksi keuangan, dan penjualan pupuk/pestisida.

Implementasi konsep laba badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif keuangan islam telah banyak dilakukan, penelitian dari Meri Yani dkk., tentang “Penguatan tata kelola BUMDes implementasi peraturan perundang undangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Pelaksanaan BUMDes yang sudah ada, tidak dapat dipungkiri masih terjadi banyak kekurangan. Tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk mendorong perekonomian masyarakat-masyarakat desa dengan mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki desa dan dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ditengah gencarnya pembentukan BUMDes, justru banyak BUMDes yang sudah terlebih dahulu berjalan banyak yang tidak jalan efektif di desa tersebut karena kurangnya pemahaman mengenai Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta Standart Operasional Prosedur (SOP) yang malah membuat pelaksanaan BUMDes menjadi terhalang untuk mencapai tujuan dari desa tersebut.

Sedangkan menurut Alfian Eikman, Mala Vinuzia tentang “ Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di

DesaTua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum berperan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga jika menggunakan indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, konsumsi pengeluaran, pendidikan, kesehatan dan perumahan masyarakat. Selain itu pelaksanaan unit usaha juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi sebuah faktor pendukung program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah rendahnya ketersediaan anggaran yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi kendala dalam memaksimalkan program serta tidak adanya agenda sosialisasi yang pernah direncanakan ataupun dijalankan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga sejak tahun 2018 (Yuliani et al., 2021).

Dalam penelitian ini perspektif Islam, konsep laba tidak hanya dipandang sebagai keuntungan material semata, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Islam mendorong para pelaku usaha untuk memperoleh laba melalui cara yang halal dan etis, serta mengalokasikannya demi kemaslahatan umat. Implementasi konsep laba yang sesuai dengan nilai-nilai Islam berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, laba tidak berhenti pada akumulasi kekayaan pribadi, melainkan menjadi sarana distribusi manfaat yang adil dan berkelanjutan dalam kehidupan sosial.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang laba BUMDes, Penelitian ini berbeda dari penelitian

sebelumnya karena tidak hanya mengkaji pengelolaan laba BUMDes dari aspek ekonomi semata, tetapi juga meninjau implementasinya berdasarkan perspektif Islam. Pendekatan ini memberikan dimensi baru dalam memahami bagaimana laba BUMDes dapat digunakan secara lebih etis dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari latar belakang tersebut, peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan mengurangi kemiskinan melalui pengelolaan usaha yang produktif. Namun, realita menunjukkan bahwa kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat sering kali belum optimal karena berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi, transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan. Dalam konteks keuangan islam, laba tidak hanya dimaknai sebagai keuntungan materi, tetapi juga harus diorientasikan pada kemaslahatan masyarakat melalui mekanisme yang halal, adil, dan etis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi laba BUMDes secara lebih mendalam dan berbasis pada prinsip-prinsip keuangan islam.

2. LANDASAN TEORI

Laba

Pengertian laba menurut ekonomi didefinisikan oleh Adam Smith sebagai kenaikan dalam kekayaan (an increase in wealthy). Lebih lanjut para ekonom sepakat bahwa laba adalah perubahan menuju keadaan yang lebih baik, lebih sehat, lebih sejahtera (well being) atau istilah yang lebih populer adalah better offness yang terjadi pada periode jangka waktu tertentu. Tetapi ukuran ekonom dalam menghitung perubahan well being atau, better offness ini tidak didefinisikan secara jelas dalam bentuk terminologi yang operasional dan dapat diterapkan dalam perusahaan. Laba menurut akuntansi, Harahap berpendapat bahwa accounting income adalah perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal

dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. Laba dalam suatu perusahaan secara umum terbagi 3 bentuk, yaitu: laba kotor, laba usaha, dan laba bersih, dimana masing-masing laba tersebut secara tidak langsung berpengaruh antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu perubahan dalam laba perlu dianalisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan (kenaikan) maupun perubahan yang tidak menguntungkan (penurunan), sehingga akan dapat diambil kesimpulan dan atau diambil tindakan seperlunya untuk periode-periode mendatang. Analisis laba dapat dilakukan dengan menggunakan teknik analisis trend, yaitu membandingkan laba perusahaan untuk beberapa periode (Wulan Astriah et al., 2021).

Keuangan Islam

Keuangan Islam bukan hanya kumpulan Teknik yang memungkinkan untuk mengatur perbankan tanpa suku bunga. Bahkan, system keuangan islam adalah sistem keuangan itu sendiri yang bertumpu pada teori ekonomi yang pada gilirannya didasarkan pada aturan dan prinsip-prinsip. Gagasan utama teori ekonomi Islam terkait barang, peran uang, solidaritas, keadilan sosial berasal dari prinsip keuangan yang biasanya direduksi menjadi larangan riba, gharar atau ketidakpastian, maysir atau spekulasi, penimbunan uang, kegiatan yang melanggar hukum (Setiawan et al., 2024). IFS berkembang sangat luas, terlepas dari segala macam hambatan yang memperlambat proses. Pada kongres internasional Islamic Bank yang diselenggarakan oleh International Association of Islamic Banks pada tahun 1979, perbankan syariah didefinisikan sebagai Lembaga perbankan yang mengumpulkan uang dan menggunakannya atas dasar syariah. Untuk membentuk masyarakat yang berdasarkan solidaritas untuk

melaksanakan pembagian kekayaan yang adil. Dengan demikian organisasi perbankan yang memiliki tujuan ekonomi berfungsi di bawah kendala dari berbagai jenis: agama, etika, sosial dan sosial.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran agama islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lilalamin yang diajarkan oleh agama islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan oleh agama islam bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi larangannya.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada implementasi laba BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari perspektif keuangan Islam. Penelitian dilakukan di BUMDes Desa Mattanete Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selama lima bulan (Februari–Juni 2025). Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pengurus BUMDes, serta data sekunder dari buku, jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya. Subjek penelitian adalah aparat pengurus BUMDes, sedangkan objek penelitian adalah implementasi laba BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip keuangan Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memperoleh makna mendalam dari fenomena yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Mattanete Bua pada zaman Pra kemerdekaan RI merupakan ronde dari wilayah kerajaan Bone. Yang telah beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan awal mulanya dipimpin oleh “PatiTanete”. Selanjutnya dipimpin oleh Mado selanjutnya dipimpin oleh kepala desa. Pada tahun 1960 Tanete buang Baru dikuatkan sebagai Desa dan Maduri merupakan wilayah Tanete buang dan pada kenal 1971 Tanete Buang di ubah namanya menjadi “Desa Mattanete Bua” yang singkata dari Maduri dan Tanete buang. Berdasarkan data Administrasi Desa Mattanete Bua tahun 2020, jumlah penduduk Desa Mattanete Bua adalah terdiri dari 485 KK, dengan jumlah penduduk total 1440 jiwa, dengan rincian laki-laki 706 jiwa dan perempuan 734 jiwa. sekitar 821 atau hampir 50% penduduk usia produktif pada usia 18-40 tahun. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Dari jumlah 485 KK diatas, hampir 40% KK di Desa Mattanete Bua adalah keluarga miskin, dan sisanya merupakan termasuk golongan keluarga pra sejahtera dan sejahtera. Wilayah Desa Mattanete Bua terdiri dari 4 dusun dengan tujuan memaksimalkan fungsi koordinasi terhadap pelayanan masyarakat di Desa Mattanete Bua. Setiap Dusun memiliki kontur dan luas wilayah yang berbeda-beda meskipun dalam satu kesatuan Desa.

a. Implementasi Laba BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Laba merupakan posisi dasar dan penting dalam keuangan yang memiliki berbagai macam kegunaan dalam berbagai konteks, laba sendiri merupakan selisi antara pengeluaran dan. Laba dalam perusahaan dapat dijadikan sebagai ukuran dalam menilai efisiensi dan efektifitas dari sebuah unit kerja karena tujuan dari suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya

baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang.

Pendapatan usaha mencerminkan aliran masuk asset perusahaan atau penyelesaian kewajiban (atau gabungan keduanya) yang berasal dari aktivitas utama operasional yang berkelanjutan. Aktivitas yang meliputi penyerahan barang, penyediaan layanan, atau kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Monoarfa et al., 2022).

1. Sumber Pendapatan Operasional Dan Non-Operasional

Dalam kehidupan sehari-hari pendapatan selalu kita dengar terutama ketika kita berbicara tentang keuangan pribadi, bisnis, atau ekonomi dengan jumlah uang atau nilai yang diterima oleh individu atau entitas sebagai hasil dari aktivitas ekonomi.

Pendapatan non-operasional merujuk pada perolehan dana yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional inti perusahaan. Jenis pendapatan ini dapat berupa pendapatan dividen, pendapatan bunga, atau keuntungan dari transaksi incidental.

Dalam hal sumber pendapatan BUMDes menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa Sumber pendapatan BUMDes terdiri dari tiga unit usaha yang pertama unit usaha air bersih, kedua penjualan pupuk dan pestisida dan yang ketiga agen BRI-link.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa BUMDes Mattanete Bua telah mengelola tiga unit usaha yaitu air bersih, penjualan pupuk dan pestisida, dan BRI – Link dengan sistem pembagian laba yang sudah diatur melalui musyawarah.

Berdasarkan dengan teori sutoro eko, BUMDes merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal. Unit usaha yang dikelola bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan asli desa dan pembukaan lapangan kerja (Sutoro Eko, 2014).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmasari dkk, yang menyatakan bahwa di kecamatan curio, enrekang menunjukkan bahwa unit usaha BUMDes meskipun masih dalam skala kecil, telah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PADes. Temuan ini mendukung bahwa usaha air bersih dan jasa keuangan BRI – Link memiliki potensi signifikan bagi peningkatan kas desa.

2. Peningkatan Pendapatan

Pendapatan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelangsungan suatu usaha, semakin besar pendapatan maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk mendanai segala pengeluaran dan kegiatan konsep pendapatan dapat digunakan untuk mengukur kondisi seseorang yang menunjukkan jumlah total uang yang diterima oleh seseorang (Ramadhan et al., 2023).

Dalam hal peningkatan hasil dan naik turunnya pendapatan BUMDes menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa peningkatan pendapatan itu naik turun tergantung penggunaan masyarakat, semisal pada tahun 2021-2022 meningkat sedangkan 2023-2024 menurun karena pernah rusak mesin air kalau rusak mesin air sedikit air yang mengalir jadi berkurang pendapatannya dan juga BRI-link pernah bermasalah mesin edisinya ada sampai tiga bulan tidak ada transaksi. Tapi pada tahun sebelumnya ada terus peningkatannya barusannya tahun lalu agak menurun karena faktor rusaknya mesin air dan mesin edisi.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pendapatan masih fluktuatif dan belum optimal karena faktor eksternal kerusakan mesin air, gangguan mesin EDC BRI – Link dan keterbatasan modal.

Berdasarkan teori chapra, M.U. dalam perspektif ekonomi islam, pendapatan adalah hasil usaha yang diperoleh secara halal melalui

pemanfaatan sumber daya yang ada. Islam menekankan pentingnya perlindungan harta melalui pemeliharaan aset dan pencegahan kerusakan, agar usaha tetap berkelanjutan dan pendapatan tidak terganggu (Yusuf, 2022).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Sinarwati dan Made Aristia Prayudi yang mengungkapkan bahwa 85,7% BUMDes mengalami peningkatan penjualan sebelum pandemi, namun beberapa mengalami penurunan penjualan selama pandemi.

3. Efisiensi Modal Kerja

Efisiensi modal kerja mencerminkan kemampuan suatu Perusahaan dalam mengupayakan pengelolaan ketersediaan modal kerja, yang berarti ketersediaan modal kerja yang dimiliki tidak lebih maupun tidak kurang sehingga mampu memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan operasinya dalam rangka untuk mendapatkan penghasilan (laba) yang optimal (Rahmawati et al., 2021).

Dalam hal efisiensi modal usaha Berdasarkan hasil wawancara menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa pengelolaan modal usahanya di awal itu langsung memang dibagi – bagi. Misalnya sekian kemarin yang dipakai untuk pembeli racun itu modalnya Rp20.500.000 untuk pembelian barang jualan. Kemudian di BRI-link Rp30.000.000, kalau air kemarin itu awalnya dikelola oleh desa. Mereka yang buat pakai dana desa dibuatkan itu pipanya dan segala macamnya baru diserahkan ke BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan modal sudah dilakukan secara transparan dan pengelolaan modal dilakukan dengan alokasi masing – masing unit usaha.

Berdasarkan teori Antonio dalam islam pengelolaan modal usaha harus memenuhi prinsip amanah, efisiensi, mashlahah. Modal harus dialkaskan secara tepat pada sektor yang produktif,

dilaporkan dengan jujur, dan digunakan untuk mendukung keberlanjutan usaha (Nisa & Dewi, 2024).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyani, Kurniawati, dan Sari mengungkapkan bahwa efesiensi pengelolaan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BUMDes. Hasil serupa ditunjukkan pada penelitian di BUMDes yang menegaskan bahwa efektivitas modal kerja dan sumber daya manusia dapat meningkatkan sisa hasil usaha.

4. Pengelolaan Modal

Pengelolaan modal kerja merupakan kegiatan yang berkenaan dengan manajemen current account perusahaan yaitu aktiva lancar dan hutang lancar (Sukoco et al., 2015).

Dalam hal pengelolaan modal menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa untuk saat ini alhamdulillah bisa tercover karena dari modal itu yang diputar. Tapi kalau ada lagi penambahan lebih bagus lagi untuk pelanggan. Karena terkadang ada orang mau penarikan dalam jumlah puluhan sampai ratusan juta itu tidak tercover.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan modal cukup efisien, namun terbatas jika terjadi permintaan besar seperti penarikan uang dalam jumlah besar di BRI – Link. Permodalan perlu ditingkatkan ketika terjadi penarikan dana dalam jumlah besar untuk menjaga kelancaran operasional.

Berdasarkan teori Antonio modal dalam islam harus dikelola secara amanah dan produktif. Salah satu prinsipnya adalah menjaga harta yang mencakup kesiapan memenuhi kebutuhan nasabah atau pelanggan, termasuk likuiditas yang memadai, agar usaha tetap berkelanjutan dan tidak menimbulkan mudarat bagi pihak lain (Widiatmika, 2015).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikah mengungkapkan bahwa penetapan modal kerja belum efektif, ditandai dengan penurunan rasio

likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas. Penelitian ini menekankan pentingnya modal kerja yang tidak terlalu berlebihan dan tetap mempertahankan prinsip ekonomi islam kejujuran dan keadilan.

Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa pengelolaan modal kerja BUMDes telah berjalan cukup efisien, meskipun masih menghadapi keterbatasan. Ketika terjadi penarikan dana dalam jumlah besar melalui unit BRI – Link, kondisi ini menunjukkan bahwa permodalan perlu ditingkatkan agar likuiditas tetap terjaga dan oprasional BUMDes berjalan lancar.

5. Strategi Pengembangan Usaha

Strategi merupakan suatu tindakan atau alat yang dilakukan suatu organisasi untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan aturan kondisi atau studi lingkungannya (Wahyuni et al., 2023).

Dalam hal Strategi BUMDes dalam mengembangkan usahanya menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa misalnya dari BRI-link kalau pendapatan sudah banyak di setor supaya masuk ke rekening dan diputar kembali. Kemudian untuk racun, kalau misalnya ada lagi modal atau ada hasil pembayarannya orang langsung lagi ke kota beli stok racun yang kurang. Kalau air paling yang di perbaiki adalah sarana dan prasarananya.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi pengembangan usaha BUMDes saat ini masih fokus pada pemeliharaan usaha yang ada dan perputaran modal secara cepat.

Berdasarkan teori David strategi pengembangan usaha mencakup upaya meningkatkan kinerja bisnis melalui manfaat sumber daya yang ada, peningkatan efisiensi, dan pembukaan peluang pasar baru. Fokus pada pemeliharaan usaha yang ada serta mempercepat perputaran modal merupakan salah satu strategi pertumbuhan intensif yang efektif bagi

usaha berskala kecil – menengah (Harahap et al., 2024).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mujiono mengungkapkan bahwa strategi pengembangan BUMDes ini meliputi peningkatan penjualan dengan memperlengkapkn pasokan barang, menjalin kemitraan usaha, meningkatkan layanan sesuai kebutuhan anggota, dan memperbaiki sarana atau prasarana.

Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa strategi pengembangan usaha BUMDes lebih menekankan pada perputaran modal dengan cepat, pemeliharaan usaha yang sudah sejalan, serta pemanfaatan modal yang tersedia secara efisien. Strategi ini diwujudkan melalui penyeteran hasil.

6. Perkembangan Penjualan

Pengembangan pada semua kegiatan yang dilakukan oleh produsen yang berkaitan erat dengan perkembangan zaman yang sangat berpengaruh terhadap naik turunnya penjualan sehingga harus dilakukan beberapa cara seperti dalam menentukan dan memperbaiki produk lama, dengan hal tersebut dapat mempengaruhi volume penjualan pada perusahaan.

Perkembangan produk adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam menghadapi kemungkinan perubahan suatu produk ke arah yang lebih baik sehingga memberikan pengaruh daya guna maupun daya pemuas yang lebih besar terhadap pengembangan produk itu sendiri (Saribu & Maranatha, 2020).

Dalam hal perkembangan penjualan menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa awal pengelolaan BUMdes itu hanya menghasilkan PAD 1 juta, 2 juta kalau sekarang bisa sampai 5 juga, 6 juta setiap tahun masih agak kecil dibandingkan BUMDes yang lain, tapi ada peningkatan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa omset cenderung meningkat dari awal pendirian BUMDes,

namun tetap dianggap kecil dibandingkan BUMDes lain.

Berdasarkan teori Camp proses membandingkan kinerja usaha dengan kinerja terbaik di industri untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang perbaikan. Dalam kasus BUMDes, pendapatan yang masih kecil dibandingkan BUMDes lain dapat menjadi dasar evaluasi strategi pengembangan usaha (Mashudin, 2024)

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merlisia dkk, mengungkapkan bahwa pengelolaan empat unit usaha alat hajatan, wisata, pupuk, dan pusat pembayaran air atau listrik, secara maksimal mampu meningkatkan saldo kas BUMDes dan sedikit menaikkan pendapatan asli desa, meskipun pertambahan dana desa relatif kecil. Hal ini mencerminkan kenaikan omset yang nyata.

7. Strategi Peningkatan penjualan

Peningkatan penjualan adalah penjualan bersih yang diakuisisi dari laporan laba perusahaan dari seluruh penjualan dalam jangka waktu tertentu dengan peningkatan (Muhtarom et al., 2022).

Dalam hal strategi penjualan menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa kalau di racun itu nanti ada orang yang mau beli tapi belum ada dananya, mereka bisa ambil dulu nanti setelah panen baru dibayar jadi itu salah satu daya tariknya. Tetapi ada perbedaan harga kalau yang dibayar langsung sama yang dibayar pada saat setelah panen.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan seperti sistem pembayaran setelah panen dan promosi melalui media sosial cukup efektif, tetapi masih terbatas pada lingkup usaha yang ada.

Berdasarkan teori Antoni strategi penjualan dalam islam harus berlandaskan prinsip kemudahan dan keadilan. Memberikan kemudahan pembayaran hingga panen merupakan penerapan

prinsip kemudahan, sementara perbedaan harga tunai dan kredit dapat dibenarkan selama disepakati di awal secara transparan (Rusby, 2024).

Sejalan dengan penelitian Fikahan Melda yang mengatakan bahwa BUMDes meningkatkan kesejahteraan warga melalui kemudahan layanan publik dan ketersediaan kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran yang fleksibel.

8. Perubahan Omset

Dalam hal perubahan omset menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa pada air faktor utamanya adalah cuaca kenapa saya katakan cuaca, sumber mata air ke tempat penampungan air itu lewat sungai. Jadi kalau misalnya musim hujan, terkadang ada pipa yang lepas, otomatis lagi diperbaiki. Biasa kalau air deras tidak langsung diperbaiki hari itu, biasa tunggu airnya tidak deras baru diperbaiki.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa perubahan omset di BUMDes dipengaruhi dua faktor. Pertama, faktor teknis dan alam, sebagaimana disampaikan ibu titin di mana cuaca memegang peran besar terhadap kelancaran distribusi air bersih. Kedua, faktor strategi pemasaran dan kondisi ekonomi, sebagaimana disampaikan oleh ibu lidia, yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat dan efektivitas promosi dapat mendorong atau menurunkan pendapatan.

Berdasarkan teori Kolter & Keller, strategi pemasaran yang efektif dapat mempengaruhi tingkat permintaan dan penjualan. Sebaliknya strategi pemasaran yang kurang optimal akan menurunkan omset. Faktor daya beli masyarakat yang dipengaruhi kondisi ekonomi juga menjadi variabel penting dalam perubahan omset (Haq-fawzi et al., 2022).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Faizal mengungkapkan bahwa pemasaran digital berkelanjutan penting untuk memperluas pasar dan menjaga omset.

b. Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Keuangan Islam

Perkembangan suatu negara dapat diketahui dari sisi pendapatan, kesejahteraan, dan kesehatan dalam suatu negara. Kesejahteraan dalam suatu negara sangat penting untuk diberikan. Alasannya, jika suatu negara tidak sejahtera, maka perkembangan dan peningkatan terhadap negara tersebut terjadi. Jika suatu negara sehat dan sejahtera maka pendapatan dalam suatu negara meningkat.

Manajemen keuangan islam di implementasikan untuk menyusun perencanaan pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki, merealisasikan rencana secara efektif dan efisien, serta melakukan kontrol atas rencana pelaksanaan yang sudah dilakukan sebagai bahan evaluasi di kemudian hari (Rianto et al., 2022).

a. Kesesuaian Pembagian Hasil Usaha

BUMDes telah berkesesuaian dengan nilai pancasila, terdapat berbagai tantangan yang harus segera diatasi terkait implementasi keberadaan BUMDes, seperti kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes yang belum merata, perwujudan konsep transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes, ketepatan sasaran dalam membentuk unit usaha dalam BUMDes, dan profesionalitas pengelolaan BUMDes yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat (Asmara et al., 2022).

Dalam hal kesesuaian pembagian hasil usaha Berdasarkan hasil wawancara menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa ada untuk pengelola, pengurus, dan PAD dan pengembalian modal kembali. Misalkan dapat 10 juta itu dibagi untuk penambahan modal kembali, kemudian ada juga kembali ke PAD, kemudian juga ada dibagi untuk pengurusnya.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa laba dibagi untuk

penambahan modal, pendapatan asli desa (PAD), dan pengurus BUMDes.

Berdasarkan teori Antonio dalam prinsip kemitraan dan kerja sama modal, pembagian keuntungan harus proporsional sesuai kesepakatan awal dan dilakukan secara adil. Bagian keuntungan boleh dialokasikan untuk reinvestasi modal, pembagian kepada pengelola, dan manfaat bagi masyarakat.

b. Sistem Pembagian

Pembagian bagi hasil usaha sebenarnya dilakukan dengan cara konvensional atau syariah. Kedua model ini memiliki karakter dan kesamaan tujuan, namun bagi hasil berdasarkan syariah lebih mewakili unsur keadilan dan sesetaraan (Husin et al., 2023).

Dalam hal sistem pembagian hasil Berdasarkan hasil wawancara menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa pembagian tersebut dirasa adil oleh masyarakat dan pengelola alhamdulillah, karena ini untuk pembagiannya tidak serta merta langsung diputuskan saja begitu tetapi melalui musyawarah bahwa sekian penghasilannya.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa prinsip keadilan, musyawarah, dan transparansi sudah mulai diterapkan dalam pembagian hasil dan pengelolaan laba.

Berdasarkan teori Antoni pembagian keuntungan harus berdasarkan kesepakatan awal, adil, dan tidak merugikan pihak manapun. Prinsip adil dan musyawarah menjadi landasan agar semua pihak merasa puas dengan hasil yang dibagi (Febrianto, 2017).

c. Kontribusi Keuntungan

Kontribusi keuntungan adalah selisih antara pendapatan penjualan dengan semua biaya variabel. Laba kontribusi atau kontribusi keuntungan yang maksimal sangat berperan untuk menutup biaya tetap perusahaan sehingga dapat menghasilkan keuntungan atau laba bersih yang besar (Sari et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa BUMDes telah memberikan manfaat nyata seperti akses air bersih dan kemudahan transaksi keuangan. Dampak sosial cukup baik, namun indikator ekonomi rumah tangga belum banyak berubah.

Berdasarkan teori Chambers pembangunan berbasis masyarakat menekankan pemberdayaan melalui penyediaan fasilitas dan layanan yang meningkatkan kualitas hidup (Collins et al., 2021).

d. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang bersifat tidak langsung.

Partisipasi secara utuh yang melibatkan aktor – aktor pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi merupakan daya dorong guna mewujudkan sistem manajemen pembangunan daerah yang terpadu menuju peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal partisipasi masyarakat Berdasarkan hasil wawancara menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa iye, kalau misalnya ada pengambilan usaha itu pasti melalui keputusan bersama tidak boleh misalnya langsung saja BUMDes yang tentukan, harus ada musyawarah dengan perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di BUMDes telah dilakukan dalam bentuk keterlibatan pada proses pengambilan keputusan. Dan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penerima manfaat.

Sejalan dengan Jusman Iskandar menyatakan bahwa desa adalah cara utama dalam menentukan kebijakan keuangan BUMDes, selaras dengan prinsip Shura dalam islam.

e. Program Kemitraan

Program kemitraan masyarakat merupakan pradigma baru dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan usaha di masyarakat yang produktif secara ekonomi untuk meningkatkan kinerja (Legowo et al., 2021).

Dalam hal Program kemitraan dengan warga lokal menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa untuk saat ini belum ada masih yang ituji, tapi ini kemarin kan ada lagi programnya yang ketahanan pangan baru – baru itu kemarin dibuat budi daya ikan itu bekerja sama dengan perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan kemitraan dengan masyarakat masih belum maksimal, meskipun ada inisiatif seperti program ketahanan pangan dan budi daya ikan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi dan Hadi mengungkapkan bahwa BUMDes menjadi mitra strategis bila diarahkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lokal secara inklusif dan berkelanjutan.

f. Respon Masyarakat

Respon adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu bukan hanya menimbulkan kesan positif, namun juga dapat memberikan tanggapan yang membangun, baik berupa kritik atau saran yang disampaikan melalui komunikasi.

Dalam hal Respon masyarakat terhadap program BUMDes menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa alhamdulillah menurut yang saya lihat saat ini cukup bagus meskipun terkadang ada tempat yang airnya tidak terlalu bagus karena faktornya banyak misalnya jauh dari tempat mata air sehingga tidak terlalu bagus air yang masuk kerumahnya atau misalnya ada pipa bocor sehingga air yang masuk kerumahnya kurang bagus.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan respon masyarakat terhadap

program BUMDes secara umum positif. Menurut ibu titin, masyarakat menilai keberadaan BUMDes sudah membantu, khususnya melalui penyediaan air bersih dan layanan lain, meskipun terdapat keluhan di beberapa wilayah terkait kualitas air yang disebabkan oleh faktor teknis seperti jarak dari sumber mata air atau pipa bocor. Sementara itu, ibu lidia menegaskan bahwa respon positif muncul karena masyarakat merasa terbantu oleh unit usaha yang ada, baik dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun mempermudah akses layanan.

Berdasarkan teori Keith partisipasi keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam suatu kelompok yang kontribusi untuk mendorong tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab didalamnya.

g. Pelaporan dan Pengawasan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang pemimpin atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi – fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan (Indrawan & Dewi, 2022). Dalam hal pelaporan dan pengawasan menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa mekanisme pelaporannya kalau kami disini, ada pengurus, ada pengawas, ada penanggung jawab dilaporkan seperti itu ada memang buku pelaporannya itu disetor di kantor.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan keuangan dilakukan secara berkala dan disosialisasikan ke masyarakat.

Berdasarkan teori Antonio dalam pengelolaan usaha, laporan keuangan yang jujur dan terbuka merupakan wujud pemenuhan amanah, yang akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat keberlanjutan usaha.

h. Laporan Keuangan

Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa dalam rangka mengelola keuangan desa harus terbuka, sebab keuangan adalah milik rakyat atau barang publik harus diketahui oleh masyarakat (Yuliani et al., 2021).

Dalam hal Laporan keuangan disosialisasikan ke masyarakat menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa biasa kalau diakhir tahun itu kami mengumpulkan pengguna fasilitas kemudian dimusyawarah di akhir apa kendalanya selama satu tahun dan di laporkan sekian pendapatannya, sekian pengeluarannya dan sekian keuntungan yang di dapatkan. Kalau Di PADnya memang dipajang di spanduk depan kantor desa.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat mekanisme pelaporan internal dan publikasi laporan keuangan melalui musyawarah akhir tahun dan spanduk di kantor desa.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syah, Sufardi, dan Sulaeha mengungkapkan bahwa meskipun akuntabilitas dan partisipasi masyarakat telah berjalan dengan baik termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan publikasi pengelolaan dana desa melalui spanduk sudah dilakukan. Namun, laporan realisasi dana desa masih

¹¹¹ Titin, Ketua BUMDes Mattanete Bua, Wawancara oleh Penulis Tanggal 12 Juni 2025

sulit diakses oleh masyarakat, sehingga transparansi masih belum optimal.

i. Pelaporan Keuangan Transparan

Kualitas pelaporan mengacu pada sejauh mana laporan keuangan suatu perusahaan mengkomunikasikan keadaan ekonomi yang mendasarinya dan kinerjanya selama periode pengukur sesuai. Ketika melihat peran penting yang dilakukan kualitas laporan keuangan dalam pengambilan keputusan bagi pengguna internal dan eksternal (Saputra, 2023).

Dalam hal Kendala dalam pelaporan keuangan yang transparan menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa paling kendalanya kan ini bukanki ahli dalam pelaporan jadi masih proses belajar terkadang masih salah.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaporan keuangan dilakukan secara berkala dan disosialisasikan ke masyarakat, namun pengelola mengakui masih belajar dalam hal penyusunan laporan yang rapi dan sesuai standar.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Made Adnyani, dkk menunjukkan bahwa kapasitas SDM, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan keuangan secara bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

j. Pendapatan, Pendidikan, Kesehatan, Spiritual

Pendidikan dapat menjadi jalan untuk maju bagi suatu negara. Keterampilan dan pengetahuan yang dikuasai oleh seseorang berasal dari pendidikan yang baik. Dengan keterampilan dan pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memperbesar peluang terwujudnya kesejahteraan dengan cara memperbesar kesempatan memiliki pendapatan yang layak. Dengan gaji tinggi dapat digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya. Pada dasarnya kesehatan menjadi

sebuah investasi pada sumber daya manusia yang diperlukan dengan tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera (Aryanti & Sukardi, 2024).

Dalam hal Pendapatan, pendidikan, kesehatan, spiritual berdasarkan hasil wawancara menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa iya, merasakan langsung banyak sekali sebenarnya manfaatnya ini unit usahanya BUMDes karena membantu masyarakat disini terutama air bersih itu sangat membantu sekali dek.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa usaha air bersih, BRI-Link, dan pupuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dalam hal akses dan kemudahan. Dan memberikan dampak pada spek pendidikan untuk belajar berwirausaha.

Berdasarkan teori Chapra kesejahteraan ini mencakup terpenuhinya kebutuhan fisik, peningkatan pengetahuan, dan terjaganya nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana, dkk menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses ekonomi, sosial, dan pendidikan. Unit usaha BUMDes seperti penyediaan air bersih, layanan keuangan mikro (BRI-Link), serta perdagangan kebutuhan pokok terbukti berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, membuka kesempatan usaha, serta mendukung terciptanya kemandirian desa. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan BUMDes tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada aspek pendidikan dan kesehatan yang menjadi fondasi kesejahteraan sosial.

k. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika tenaga kerja memperoleh upah yang sapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan yang bersifat ekonomi maupun

kebutuhan yang bersifat non ekonomi dan bukan hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan layak (Sulistiawati, 2012). Dalam hal BUMDes sudah membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat menurut narasumber pertama, selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa kalau untuk saat ini belum, hanya beberapa orang paling kalau mau bilang mensejahterahkan belum dek, karena kalau mau mensejahterahkan itu haruspi penghasilannya berapa, adaji penghasilannya untuk pengurus tapi belumpi bisa dikatakan untuk mensejahterahkan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelola mengakui dampaknya terhadap kesejahteraan masih terbatas dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan teori Chapra kesejahteraan masyarakat harus mennyentuh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya pengelola atau pihak tertentu. Prinsip keadilan dan mashlahah mengharuskan manfaat usaha bersama seperti BUMDes didistribusikan secara proporsional dan inklusi.

Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa keberadaan BUMDes memang telah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan air bersih dan fasilitas penunjang lain yang cukup membantu kehidupan sehari-hari. Namun, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh masih terbatas dan belum dapat dikategorikan mampu mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

9. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BUMDes Desa Mattanete Bua, dapat disimpulkan :

1. Implementasi laba BUMDes dilakukan melalui tiga unit usaha utama, yaitu persediaan air bersih, penjualan pupuk dan pestisida, serta layanan BRI-Link. Laba yang dialokasikan untuk modal

usaha, Pendapatan Asli Desa (PAD), dan insentif bagi pengurus. Pengelolaan dilakukan secara musyawarah, meski pendapatan masih fluktuatif dan belum maksimal.

2. Dari perspektif keuangan islam, implementasi laba BUMDes telah mencerminkan prinsip – prinsip seperti keadilan, musyawarah, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Meskipun demikian, pengelolaan dan pelaporan keuangan masih membutuhkan peningkatan kapasitas SDM agar sejalan dengan amanah dan nilai – nilai syariah.
3. Kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat terlihat dalam bentuk akses terhadap air bersih, kemudian transaksi keuangan melalui BRI-Link, dan fleksibilitas sistem pembayaran pupuk. Namun, kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh masih terbatas, terutama pada aspek pendapatan masyarakat secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Aryanti, E. D., & Sukardi, A. S. (2024). Pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(2), 117–133. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i2.918>
- Asmara, A. D., Gultom, A., Salam, R., & Handayani, N. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan*

- Administrasi Negara*, 6(2), 259.
<https://doi.org/10.30737/mediaso sian.v6i2.3163>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title 済無No Title No Title No Title*.
- Febrianto, S. (2017). *Problematisa Hukum Indonesia teori dan Praktik*. 285.
- Haq-fawzi, M. G., Iskandar, A. S., & Erlangga, H. (2022). *Konsep , Teori dan Implementasi*.
- Harahap, K., Suwastika, I. W. K., Mahmuddin, M., & Pahrul, P. (2024). *Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis (Based Case Study)*.
- Husin, D., Rusydi, R., Fata, K., Raihan, R., Faisal, F., & Wijaya, I. (2023). Perspektif Model Bagi Hasil Laba Usaha Berbasis Syariah Pada Bumdes Sebagai Solusi Mitra Berkeadilan. *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 29.
<https://doi.org/10.35308/akbis.v7 i1.7446>
- Indrawan, I. P. A., & Dewi, P. E. D. M. (2022). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BUMDES Se-Kabupaten Jembrana. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2), 501–512.
- Legowo, M. B., Prayitno, D., & Indarto, B. (2021). Program Kemitraan Masyarakat Untuk Sosialisasi Program Digitalisasi Umkm Di Wilayah Jakarta Pusat. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 3(2), 588–601.
<https://doi.org/10.31316/jbm.v3i 2.1766>
- Mashudin, A. (2024). Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Citamanis Desa Citaman Jernih Serdang Bedagai. *Journal Of Social Science Research*, 4(3), 9808–9819.
- Monoarfa, R., Buhang, M. Z., & Pakaya, L. (2022). Analisis Modal Kerja dalam Peningkatan Laba Usaha pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bolugo di Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang. *Jurnal Mahasiswa ...*, 1(3), 154–168.
- Muhtarom, A., Syairozi, I., & Wardani, N. D. (2022). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 743–755.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v5 i1.628>
- Nisa, N. K., & Dewi, P. M. S. (2024). Perspektif Etika Bisnis Dalam Kerangka Teori Islam: Pemahaman Danimplementasi. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 395–400.
- Purba, A. A., Agelia, D. P., Natasya, N., & Tambunan, K. (2025). Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi Yayasan Salmiah Education Global International (YSEGI) Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1–13.
- Rahmawati, R., Setiawan, I., & Setyowati, D. H. (2021). Penilaian Efisiensi Pengelolaan Modal Kerja dan Kinerja Keuangan pada PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 1(2), 316–329.
<https://doi.org/10.35313/ijem.v1i 2.1766>

- 2.2500
 Ramadhan, A., Rahim, M. S. R., Kom, S., Kom, M., & Utami, N. N. (2023). Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio). *Tahta Media*, 02(2), 34–37.
- Rianto, H., Putri, A., & Aseandi, R. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Muslim Melalui Implementasi Manajemen Keuangan Islami. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 173. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i1.4585>
- Rusby, Z. (2014). *Pemikiran Ekonomi Dalam Islam*.
- Saputra, M. G. (2023). Analisis Dampak Laporan Keuangan Yang Transparan Terhadap Keputusan Investasi Saham. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 1162–1175. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3508>
- Sari, L. N., Palinggi, Y., & Adawiyah, R. (2022). Analisis Kontribusi Keuntungan Atas Produk-Produk Pada CV. Salim Tailor Di Tenggaraong (Penerapan Linear Programming Metode Simplek). *Jurnal Ekonomi & Manajemen Indonesia*, 18(2), 1–11. <https://doi.org/10.53640/jemi.v18i2.524>
- Saribu, H. D. T., & Maranatha, E. G. (2020). Pengaruh Pengembangan Produk, Kualitas Produk dan Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan Pada PT. Astragraphia Medan. *Jurnal Manajemen*, 6(1), 1–6.
- Setiawan, I., Yahya, M., Yahya, I., & Sukendar. (2024). Konsep Bunga Anti Riba Dalam Persepektif Prinsip Ekonomi Islam Pada Bank Syariah. *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(1), 2722–8096. <https://www.lisyabab.staimaswonogiri.ac.id/lisyabab/article/view/251/100>
- Sukoco, A. R. F., P, M. W. E. N., & ZA, Z. (2015). Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro Untuk Memperoleh Profitabilitas (Studi pada UD. Warna Jaya Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 22(1), 1–9.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksos*, 8, 195–211.
- Sutoro Eko. (2014). Buku Desa Membangun Indonesia Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). In *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*.
- Wahyuni, S, R., & Junaeda. (2023). Analisis Strategi Pengembangan Usaha Percetakan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 25(4), 740–749.
- Wulan Astriah, S., Trinanda Akbar, R., & Apriyanti, E. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 387–401.
- Yuliani, R., Binti, R. E., Limarjani, S., Misra, A., Hardy, E., Sari, N. A., & Yasin, M. (2021). Digitalisasi Laporan Keuangan BUMDes Kayu Bawang. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 1(1), 47.

<https://doi.org/10.20527/ilung.v1i1.3459>

Yusuf, S. D. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 65–79. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v3i1.633>

